

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 2019-2020
(STUDI KASUS DI KELURAHAN DONGKOP)**

Iryanto¹, Edy Akhyary², Novi Winarti³,

Iryantoanto27@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja
Ali Haji

ABSTRACT

The increasing population growth has made the Tanjungpinang City Government run the Family Planning Village (KB) program, one of which is in the Dongkop Village area. The Tanjungpinang City Government, Riau Islands has designated Dongkop Village as one of the Family Planning Village (KB). Family Planning Village Services will also be integrated with other sectors, such as education, health, and social services. However, the phenomenon that occurs is that this program has not run as expected, many people do not know the benefits of the KB Village, then the lack of human resources to run it. Then the obstacle is that the local government cannot unite other related agencies. The purpose of this study is to determine the implementation of the Family Planning Village Program by the Tanjungpinang City Government (In Dongkop Village). In this study, the author uses a qualitative descriptive type of research. The result of the research is that the Implementation of the Family Planning Village Program by the Tanjungpinang City Government (In Dongkop Village) is good. The Dongkop Village itself is in accordance with the decision of the Dongkop Lurah Number 25 of 2020 concerning the determination of the management of the KB Village management, but for cadres and then the management needs information such as training and socialization specifically in this KB Village Program, the implementers are considered to need to master the existing technical instructions. In implementing the implementation, the Village Family Planning Technical Guidelines are also very necessary, because with the existence of a standard, namely the Juklak (implementation instructions), it is hoped that the activities contained in the KB Village Program, therefore the training carried out must be continuous and equitable.

Keywords: Implementation, Family Planning

I. Pendahuluan

Gerakan KB bermula dari kepeloporan beberapa orang tokoh, baik didalam maupun diluar negeri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB diseluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan PKBI (perkumpulan keluarga berencana Indonesia). Peristiwa-peristiwa bersejarah di dalam perkembangan di Negara Indonesia adalah masuknya program keluarga berencana itu kedalam repelita I. Adanya KUHP pasal 283 yang melarang menyebarkan gagasan keluarga berencana sehingga kegiatan penerangan dan pelayanan masih dilakukan secara terbatas.

Program kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu inovasi program pemerintah. Kehadiran kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2019-2020, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB.

Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada kampung KB selain keluarga PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksanaannya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Kota Tanjungpinang saat ini merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan jumlah penduduk yang pesat. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang tercatat sebanyak 149.354 jiwa, sedangkan pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang tercatat sebanyak 220.802 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah laki-laki sebanyak 73.267 jiwa dan perempuan 76.078 jiwa dengan jumlah total sebanyak 149.354 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah laki-laki sebanyak 121.451 jiwa dan perempuan 99.351 jiwa dengan jumlah total sebanyak 220.802 Sementara itu, jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yakni :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Tanjungpinang Barat	33.297 22,29% Jiwa	47.801 21,64 % Jiwa
2.	Tanjungpinang Timur	62.684 41,97 % Jiwa	96.218 43,57 % Jiwa
3.	Tanjungpinang Kota	14.558 9,76 % Jiwa	20.196 9,16 % Jiwa
4.	Bukit Bestari	38.815 25,98 % Jiwa	56.597 25,63 % Jiwa

(sumber: Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Tahun 2019-2020)

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang menjalankan Program Kampung Keluarga Berencana, salah satunya di daerah Kelurahan Dompok. Dasar Hukum pembentukan Kelurahan Dompok berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang maka Pemerintah Kota Tanjungpinang terbagi dalam 4 (empat) Kecamatan yaitu : Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Bukit Bestari.

Yang merupakan titik lokasi Kampung KB adalah Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kelurahan Dompok merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan Bukit Bestari yang terdiri 4 Rukun Warga dan 14 Rukun Tetangga. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Bukit Bestari, jumlah laki-laki 31.184 jiwa dan perempuan 32.237 jiwa

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Bukit Bestari.

No	Kelurahan	Tahun 2020
1	Tanjungpinang Timur	11.500 Jiwa
2	Tanjung Unggat	16.156 Jiwa
3	Tanjung Ayun Sakti	14.582 Jiwa
4	Sei Jang	17.288 Jiwa
5	Dompok	3.892 Jiwa

(sumber. Kantor Kecamatan Bukit Bestari, Tahun 2020)

Berdasarkan hasil observasi awal, program kampung KB ini belum berjalan sesuai dengan harapan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat kampung KB. Masih minimnya kesadaran masyarakat dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang disebabkan oleh faktor ekonomi, perlu adanya peran pemerintah untuk memecahkan permasalahan seperti ini. Di Kelurahan Dompok saat ini sedikit sekali kesadaran masyarakat dalam program KB, disisi lain program ini pada umumnya sangat diperlukan untuk seluruh masyarakat.

Sementara itu, Program kampung KB tersebut sangat penting untuk menekan pertumbuhan penduduk, sekaligus memberdayakan potensi masyarakat agar berperan dalam pembangunan. Program ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan pengurus RT dan RW. Semua pihak yang terlibat dalam program ini harus memiliki komitmen, bersinergi sehingga Kampung KB bukan sekadar acara seremonial belaka yang kemudian ditinggalkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Di Kelurahan Dompok)?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Di Kelurahan Dompok)

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dikatakan oleh Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2004:5) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta megemukakan berbagai gambaran dan permasalahan dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Di Kelurahan Dompok).

Berdasarkan lokasi pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian lapangan yaitu mengadakan kegiatan mengumpulkan data-data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang meliputi :

a. Wawancara

dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap Responden dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Di Kelurahan Dompok).

b. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa, seperti, gambar, atau karya-karya, dari seseorang, dokumen berbentuk tulisan, sejarah harian, kriteria, biografi, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa,, dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain, studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (sugiono 2013:240).

c. Observasi

Menurut Sugiyono (2012 : 166) teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan Observasi dilakukan dengan cara melihat sejauh mana pelaksanaan program KB di Kelurahan Dompok sesuai dengan prosedur, syarat dan sasaran, serta ketepatan pelaksanaan program yang dilakukan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu dengan melakukan terlebih dahulu mendeskripsikan, memverifikasi, menginterpretasikan untuk kemudian dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Moleong (2004 : 35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data.

Informan adalah orang yang berada pada lingkungan penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara *representative*, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

III. Hasil dan Pembahasan

Salah satu untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program keluarga berencana, Program Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu inovasi program pemerintah. Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP), serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Pencanangan Kampung KB ini merupakan langkah untuk menyuluhkan kepada masyarakat agar dalam menerima pelayanan KB bisa lebih efisien dan lebih cepat. Dalam masa pertumbuhannya, nantinya masyarakat bisa hidup lebih berkualitas lagi. Salah satu wilayah di Kota Tanjungpinang yang menajalankan Kampung KB adalah Kelurahan Dompok, untuk mengetahui pelaksanaannya maka dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Dalam program KB ada standar dan sasaran dalam pelaksanaannya, standar sendiri mengacu pada aturan yang berlaku sedangkan sasaran dimana pemerintah menentukan wilayah yang mana yang layak untuk dijadikan kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kampung KB di Kelurahan Dompok ini sudah berjalan sesuai dengan syarat dan ketentuannya, sudah memiliki standar kebijakan yang mengacu pada Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2020 dan sasaran juga sudah dianggap tepat karena masuk dalam kriteria lingkungan yang perlu dilaksanakan kampung KB. Pada dasarnya hasil dari program KB berguna untuk pembangunan dan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Upaya untuk terus memaksimalkan pelaksanaan program KB tentu menjadi pilihan mutlak bagi pemerintah saat ini.

2. Sumberdaya

Dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia (masyarakat) maupun sumber daya non manusia (Alat Kontrasepsi/KB). Untuk mendukung pelaksanaan program Kampung KB maka dibutuhkan sumber daya seperti orang-orang yang memahami tentang program KB, kemudian sarana prasarana dan pendanaan.

Berdasarkan hasil penelitian Jika dilihat sarana juga sudah memadai namun untuk pendanaan masih sangat minim, pemerintah daerah tidak menyiapkan dana khusus untuk program ini begitu juga dengan pemerintah pusat, selama ini dana diambil dari swakelola masyarakat. Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat menjadi masalah besar di Indonesia begitu juga di Kota Tanjungpinang, hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Selain itu, upaya dari pemerintah khususnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam masalah kependudukan dengan program keluarga berencana belum maksimal, bahkan melemah sereta mengalami penurunan.

3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga di perlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Dalam mewujudkan program kampung KB yang sesuai dengan tujuan awalnya maka di perlukan hubungan antar organisasi yang saling bersinergi dan berkoodinasi satu sama lain karena mengingat dalam pelaksanaannya membutuhkan beberapa instansi terkait

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa koordinasi sudah berjalan realisasinya sangat memerlukan berjalanya koordinasi, baik itu koordinasi antar unit-unit yang ada dalam organisasi maupun dengan instansi atau pihak-pihak terkait. maka di ketahui bahwa adanya koordinasi antar instansi. Pembagian tugas BKKBN dalam berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya berdasarkan arahan dan masing-masing instansi semua sudah di jelaskan dari surat keputusan. Program Kampung KB merupakan program yang bersifat lintas sektoral, maka di perlukan koordinasi dan

penajaman program serta kegiatan pembangunan yang intensif antara semua instansi terkait. Karena kunci penentu kesuksesan kampung KB adalah koordinasi semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaanya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga di perhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang di libatkan termasuk dalam program kampung KB ini.

Berdasarkan hasil penelitian maka di ketahui bahwa adanya pola hubungan yang di bangun dalam program kampung KB di kelurahan Dompok. Pola hubungan antar instansi yaitu antara BKKBN kemudian pihak kelurahan, dinas kesehatan dan masyarakat semua saling bersinergi, kurangnya informasi mengenai program KB tersebut sehingga di bentuklah kampung KB agar masyarakat Indonesia dapat mencanangkan program KB secara keseluruhan. Pembentukan kampung KB ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara, melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta membangun sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di ketahui bahwa masyarakat sudah mendukung adanya kampung KB di daerah mereka. Namun memang diakui kurangnya sosialisasi dan komunikasi program ini, strategi komunikasi sangat di perlukan dalam program kampung KB dapat di capai dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui respon masyarakat sangat positif, masyarakat RW 03 sangat kompak dalam menjalankan program ini, sebelumnya orang sudah mau di ajak ke posyandu, kemudian berbeda pandangan terhadap KB namun sejak adanya program kampung KB ini mereka memahami tentang pentingnya posyandu dan KB.

maka dapat dianalisa bahwa masyarakat di Kelurahan Dompok khususnya di RW 03 sudah ikut mendukung adanya program KB di wilayah mereka, hal ini dibuktikan bersedianya masyarakat ikut menjadi kader posyandu. Kemudian bersedia mendukung dengan membantu baik pendanaan kemudian makanan pada saat posyandu berlangsung. Sejauh ini pihak kelurahan dan kader juga masyarakat sudah merespon dengan baik program ini. program kampung KB ini di harapkan bisa berjalan lancar dan bisa meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat Indonesia.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang di miliki oleh implementor. Dalam kebijakan ini di butuhkan kemauan implementor serta pihak kelurahan dan instansi terkait dalam pelaksanaan, kemudian memberikan pemahaman kebijakan untuk pemahaman saya rasa belum berjalan maksimal. Karena harusnya perlu adanya pelatihan untuk memaksimalkan program ini.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa untuk pelatihan memang masih perlu di tingkatkan, karena selama ini tidak semua kader dan masyarakat di ikutkan dalam pelatihan dan sosialisasi sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak yang perlu di perhatikan. Sikap atau kecendrungan para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap). Pak RT lebih ke arah remaja, kalau kader posyandu itu ibu-ibu, perlu adanya pelatihan sosialisasi dan pengetahuan tentang kampung KB lebih lanjut. Khususnya untuk pembinaan kader dan pengurus KB, karena selama ini pelatihan minim di lakukan dan peserta juga di batasi hanya ketua saja yang hadir. Karena peran kader KB yang sudah di bentuk untuk terus menyosialisasikan program-program BKKBN ini tidak terputus, dalam memahami kampung KB serta pelatihannya, peresmian kampung KB RW 03 tanggal 22 oktober 2017.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Preogram Kampung Keluarga Berencana Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Kasus kelurahan Dompok) sudah baik, hal ini dapat dilihat dari :

1. Standar dan sasaran kebijakan ditemukan bahwa Kelurahan Dompok sendiri sesuai dengan keputusan Lurah Dompok Nomor 25 Tahun 2017 tentang penetapan kepengurusan pengelola Kampung KB, Kelurahan Dompok resmi menjalankan program Kampung KB. Kelurahan Dompok tepatnya di RW 003 sudah menjalankan program Kampung KB, pemilihan RW 003 sudah sesuai dengan standar dan sasaran dari program KB tersebut. Kampung KB adalah suatu upaya yang merupakan gagasan pemerintah yang memiliki makna sebagai pembangunan nasional yang difokuskan untuk pengembangan yang berawal dari tingkat paling rendah yaitu desa atau kampung
2. Sumber daya ditemukan bahwa nama-nama tersebut dipilih atas pertimbangan tertentu salah satunya adalah komitmen untuk menjadikan wilayah RW 003 ini adalah Kampung KB yang bisa di contoh oleh daerah lainnya, kemudian jika dilihat saran juga sudah memadai namun untuk pendanaan masih sangat minim, pemerintah daerah tidak menyiapkan dana khusus untuk program ini begitu juga dengan pemerintah pusat, selama ini dana diambil dari swakelola masyarakat.
3. Hubungan antar organisasi ditemukan bahwa adanya koordinasi antara instansi. Pembagian tugas BKKBN dalam berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya berdasarkan arahan dan tupoksi masing-masing instansi semua sudah dijelaskan dan surat keputusan. Program Kampung KB merupakan program yang bersifat lintas sektrol, maka diperlukan koordinasi dana penajaman program serta kegiatan pembangunan yang intensif antara semua instansi terkait.
4. Karakteristik agen pelaksanaan ditrmukan bahwa adanya polos hubungan yang di bangun dalam program Kampung KB di Kelurahan Dompok. Pola hubungan antara instansi yaitu antara BKKBN kemudian pihak Kelurahan, Dinas Kesehatan dan Masyarakat semua saling besinegri, kurangnya informasi mengenai Program KB tersebut.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi ditetntukan bahwa masyarakat di Kelurahan Dompok khususnya di RW 003 sudah ikut mendukung adanya program KB di wilayah mereka, hal ini dibuktikan bersedu\ianya masyarkat ikut menjadi koder posyandu. Kemudian bersedia mendukung dengan membantu baik pendanaan kemudian makanan pada saat posyandu berlangsung. Sejauh ini pihak Kelurahan dan kader juga masyarakat sudah merespon dengan baik program ini.

V. Daftar Referensi :

- Abdulsyani, 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah.
- Agus, Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabetha
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*. Jakarta: BPS
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miriam Budiharjo, 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wayne Parson. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana
- Hariyoso, S. 2002. *Pembangunan. Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Bandung: Peradaban.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaya. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Anisa, S.O. 2016. *Efektifitas Kebijakan Kampung KB Terhadap Penerimaan Konsep Keluarga*. Cilacap
- Zuhriyah, Aminatuz, Sofwan Indarjo dan Bambang Budi Raharjo. 2017. *Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana*. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*. Vol. 1 No. 4
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelaja
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung. : Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar. Maju
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Jurnal**
- Ferawati, (2017). *Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*.
- Nurhafifah Zultha, (2017). *Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung*.
- Lathifa Nafizah, (2008). *Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kota Yogyakarta*.

Suandi, (2010). Hubungan antara Karakteristik Rumah Tangga dengan Partisipasi dalam Keluarga Berencana di Provinsi Jambi.

Niken Septihandini Puspaningtyas, (2010). Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pedurungan.

Perundang-undangan :

Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2018 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.